

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PENGAMANAN PADA  
ACARA HIBURAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH JINAYAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas  
dan Syarat-syarat Memporoleh  
Gelar Sarjana Hukum Islam



**HENDRA**  
**10724000066**

**PROGRAM SI**  
**JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringnya acara hiburan berakhir dengan kerusuhan sehingga sangat meresahkan masyarakat yang menyaksikan acara hiburan yang di selenggarakan, hingga menggugah pihak Kepolisian untuk mengatasi kerusuhan tersebut, yakni dengan melaksanakan tugas dan perannya sebagai kepolisian dan tugas tersebut juga di bantu oleh Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat, Para Ulama, yang ikut berpartisipasi dalam mengatasi tindak kejahatan yang terjadi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni peranan dari pihak Kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis, Respon Masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Terhadap upaya Antisipasi yang di lakukan oleh pihak Kepolisian supaya tidak terjadi kerusuhan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat, dan pandangan Fiqh jinayah terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, angket dan obsevasi sebagai data primer yang di himpun dari pihak Kepolisian Sektor Rupat dan masyarakat. Sedangkan data skunder adalah data yang di peroleh dari angket yang di sebarakan kepada masyarakat dan dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang di teliti. Setelah data tersebut di peroleh, lalu di analisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.

Melalui wawancara, angket dan observasi di lapangan dengan responden, di peroleh jawaban-jawaban bahwa Kepolisian Sektor Rupat di sini telah berperan dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di dilaksanakan oleh masyarakat, setelah di ketahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dalam pandangan fiqh jinayah dengan menampilkan Nas-Nas Al-qur'an dan Hadist untuk mempertegas kesimpulan yang di tarik.

Dari uraian-uraian yang di sajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh bahwa kebijakan yang di buat oleh kepolisian sektor Rupat sudah baik dan menjalankan tugas dan fungsinya sebagai kepolisian, tetapi realita yang sering terjadi yaitu para masyarakat khususya pemuda yang melakukan, tindak kejahatan, di sebabkan oleh faktor pendidikan, keluarga dan pergaulan, sedangkan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum sudah bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan. ....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Karakteristik Wilayah .....	14
B. Jumlah Penduduk .....	15
C. Sarana Pendidikan .....	17
D. Kehidupan Beragama .....	18
E. Mata Pencarian Masyarakat .....	20
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN KEPOLISIAN</b>	
A. Pengertian.....	21
B. Fungsi Dan Peranan Kepolisian .....	22
C. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	25
D. Konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik .....	35
E. Hukum atas tindak pidana hirobah (gangguan keamanan) ..	37
<b>BAB IV TIJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PENGAMANAN PADA ACARA HIBURAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT</b>	
A. Peranan dari pihak Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan Pada Acara Hiburan Yang Di Selenggarakan Oleh Masyarakat. ....	39
B. Respon masyarakat terhadap upaya dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan pada acara hiburan yang di selenggrakan oleh masyarakat.....	49
C. Pandangan fiqh Jinayah terhadap peranan dari pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat.....	56

<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	ix
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II. 1</b>	Struktur Tipe Rural Kapolsek Rupert Kabupaten Bengkalis .....	15
<b>Tabel II.2</b>	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kelurahan Dikecamatan Rupert .....	16
<b>Tabel II.3</b>	Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Di Kecamatan Rupert .....	17
<b>Tabel II.4</b>	Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Rupert .....	18
<b>Tabel II.5</b>	Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Rupert .....	19
<b>Tabel II.6</b>	Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Rupert .....	19
<b>Tabel II.7</b>	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Di Kecamatan Rupert .....	20
<b>Tabel IV.1</b>	Apakah Acara Hiburan Yang Diselenggarakan Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Sering Terjadi Kerusuhan .....	46
<b>Tabel IV.2</b>	Respon Masyarakat Terhadap Pembinaan Dan Peranan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Sektor Rupert Kabupaten Bengkalis .....	50
<b>Tabel IV.3</b>	Penyebab Remaja Melakukan Kerusuhan Pada Acara Hiburan .....	54
<b>Tabel IV.4</b>	Hal-Hal Yang Mendorong Ketika Remaja Melakukan Kerusuhan Pada Saat Acara Hiburan Diselenggarakan .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Acara hiburan merupakan suatu hal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di mana melihat atau menyaksikan acara hiburan orang atau masyarakat dapat mengurangi kejenuhan dari rutinitas kegiatan atau pekerjaan sehari-hari.<sup>1</sup>

Selain itu ada juga beberapa faktor pendukung lainnya, di antaranya yang paling penting adalah faktor keamanan dalam artian petugas keamanan yang memadai dan profesional hal ini dikarenakan sering bahkan hampir selalu terjadi atau timbulnya permasalahan pada acara-acara hiburan adalah akibat dari kurangnya perhatian dari pihak penyelenggara tentang keamanan pada acara-acara yang akan diselenggarakan, untuk menciptakan suasana aman dan tertib sehingga acara yang diselenggarakan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Pihak penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian.

Tugas dan fungsi polisi adalah suatu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjelaskan polisi adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

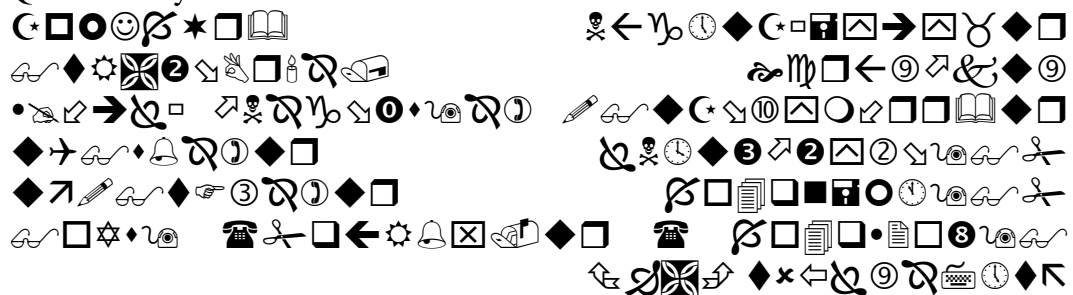
---

<sup>1</sup> KRMT Indro Kampling'susono, *Cara Pintar Jadi Event Organizer*, (Yogyakarta: Galang Press, 2006), hal 51.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diklasifikasikan menjadi tiga yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup> dalam menjalankan tugas pokok memelihara ketertiban masyarakat, Polri memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbina suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

Q.S.Al-Anbiya' a: 73



“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah<sup>3</sup>.”

Pasal 1 (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Indonesia menyatakan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang di tandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang megandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dan menangkal, mencegah dan megulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya

<sup>2</sup> Undang-undang NO.2 tahun 2002, *Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

<sup>3</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 328

yang dapat meresahkan masyarakat serta dapat menghindarkan tindakan-tindakan yang membahayakan di masyarakat umum.<sup>4</sup> menurut Prof.Djodikoro dalam bukunya yang berjudul tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia menerangkan” bahwa bahaya umum hanya mengenai barang benda, dan di samping itu di sebutkan unsur bahaya maut bagi orang lain yang dapat pula ditambah dengan kematian orang akibat perbuatan si pelaku”<sup>5</sup>.

Hukum dalam masyarakat manapun adalah bertujuan untuk mengendalikan masyarakatnya. ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan terutama untuk melindungi hak-hak individu maupun hak masyarakat. Sama halnya dengan islam yang memiliki sistem hukum sendiri yang di kenal dengan fiqih.<sup>6</sup>

Hukum pidana Islam tentang seseorang yang melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya merupakan tindakan yang dapat dikenakan hukum termasuk ruang lingkup kepidanaan, hukum kepidanaan yang di maksud jarimah . jarimah terbagi dua, yaitu jarimah hudud dan jarimah ta'zir.<sup>7</sup>

Dikecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis banyak muncul kasus kerusuhan yang di latar belakang oleh acara-acara hiburan baik itu yang di selenggarakan masyarakat atau *event organiser* (EO), masyarakat sebagai penonton acara hiburan tersebut tidak pernah mengapa hal itu terjadi, bagi mereka yang penting adalah menikmati acara hiburan tanpa harus memikirkan hal-hal yang menjadi urusan pihak penyelenggara.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Wirjono Prodjokoro, *Tindak-Tindak Kejahatan Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT Grafika Aditama, 2003), hal.133.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1986) Cet.ke.1,h.6

<sup>7</sup> Zainuddin ali, M.A, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007),h.22



Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, penyelenggara hiburan harus lebih memperhatikan faktor keamanan, penyelenggara dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan pada acara hiburan yang akan diselenggarakan, karena itu adalah salah satu tugas dan kewajiban dari kepolisian sehingga acara yang diselenggarakan berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Keadaan yang aman dan tertib adalah dambaan dari semua lapisan masyarakat tapi mengapa kerusuhan dan insiden-insiden yang sering kali terjadi pada acara-acara hiburan, pihak yang mana yang harus di salahkan tentang hal ini apakah pihak penyelenggara atau pihak kepolisian.

Kerusuhan yang terjadi pada suatu acara hiburan mempunyai dampak yang sangat merugikan masyarakat khususnya para penonton dari acara hiburan tersebut, Dampak-dampaknya antara lain:

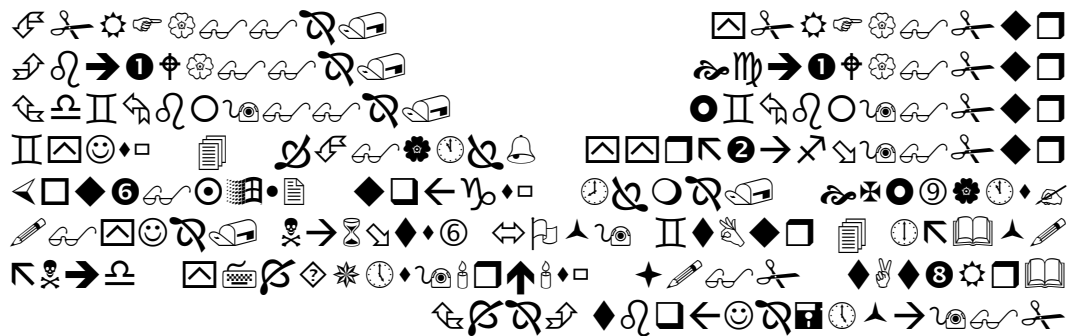
1. Dapat menimbulkan korban hilangnya nyawa manusia
2. Dapat menimbulkan korban luka-luka
3. Dapat menimbulkan kerugian yaitu hancur atau rusak nya suatu bangunan atau harta benda.

Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja menganiaya atau melukai orang lain. dalam hal melukai atau mencenderai, maka sanksi terhadap pelakunya, yaitu qisas yang sebanding dengan perbuatannya.<sup>8</sup>

Allah Berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 45:



<sup>8</sup> Nasir Choliz, *fiqih Jinayah* , (Pekanbaru: Susqa press, 2000), h.2



“dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim<sup>9</sup>.”

Untuk menghindari dampak dari kerusuhan yang terjadi maka pihak penyelenggara yang bekerja sama dengan pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkah yang bersifat preventif sehingga bila terjadi kerusuhan dapat segera di atasi atau di redakan.

Kejadian pada hari kamis 10 september 2009 dilaksanakan acara hiburan orgen tunggal pada malam harinya dan pada saat acara tersebut berlangsung maka terjadilah perkelahian antara penonton, perkelahian terjadi akibat pengaruh dari minuman alkohol yang di konsumsi oleh para pemuda kasus ini di lakukan oleh Bustami Alias Trubus Bin Zaini, pada hari kamis tanggal 10 september 2009 sekitar jam 21.30 wib bertempat di Jl. Bahari Gg Kampung Baru telah melakukan penganiayaan terhadap Erianto (korban) yang menyebabkan korban luka-luka. Perbuatan Bustami tersebut di lakukan dengan cara membacok benda tajam kepada korban dari belakang yang mengenai bahu sebelah kanan. Dan korban

---

<sup>9</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (bandung: PT.Sygma Media Arkarlema, 1987), h.394

melakukan perlawanan tetapi sia-sia dan Bustami berhasil membacok korban untuk kedua kalinya di bagian punggung korban dan setelah itu korban jatuh terlungkup di atas tanah dan Bustami pergi meninggalkan korban dalam keadaan berlumuran darah dan senjata tajam yang di pergunakan oleh Bustami di buang ke dalam parit yang tidak jauh dari tempat kejadian. Maka akibat perbuatan Bustami tersebut korban tergeletak dan mengeluarkan darah yang banyak maka korban langsung di larikan ke rumah sakit oleh beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut.

Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis animo masyarakat sangatlah besar terhadap terselenggaranya acara hiburan terkhusus acara hiburan malam, hal ini terlihat dari seringnya acara hiburan atau pertunjukan yang diadakan baik perorangan maupun secara bersama-sama. Bagi masyarakat di Kabupaten Bengkalis sendiri, meyenggarakan hiburan merupakan hal yang biasa, namun yang menjadi permasalahan ada di beberapa kejadian pihak kepolisian tidak berada di lokasi ketika kerusuhan terjadi. contoh kongkrit kerusuhan yang sering terjadi dalam acara-acara hiburan antara lain adalah perkelahian antara penonton yang kemudian berlanjut menjadi tauran atau perang kampung yang dampaknya sangatlah merugikan masyarakat.

Oleh karena itu peranan pihak kepolisian sangatlah penting untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tertib pada acara-acara hiburan untuk lebih megetahui sejauh mana pihak kepolisian menjalankan peranannya penulis mengambil judul skripsi tentang **“Peranan Kepolisian dalam Memberikan Pengamanan pada Acara Hiburan yang Diselenggarakan Masyarakat di**

**Tinjau Dari Perspektif Fiqh Jinayah”** (Studi Kasus Di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)”).

## **B. Batasan Masalah**

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memfokuskan tentang respon masyarakat di kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis terhadap upaya yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengantisipasi kerusuhan, dan Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap peranan pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan dari pihak kepolisian di kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupert dalam memberikan pengamanan pada suatu acara hiburan?
2. Bagaimana respon masyarakat Kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupert terhadap upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan?
3. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap peranan pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui peranan dari pihak kepolisian di kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupert dalam memberikan pengamanan pada suatu acara hiburan.
- b. Untuk mengetahui respon masyarakat Kabupaten Bengkalis Kecamatan Rupert terhadap upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan
- c. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

##### **2. Kegunaan penelitian.**

- a. Sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Suska Pekanbaru.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang masalah yang diteliti.

- c. Sebagai sumbangan pikiran penulis dalam karya ilmiah khususnya dalam bidang Hukum Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di kepolisian Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis karena di Kecamatan Rupat kabupaten Bengkalis masyarakat sering menyelenggarakan acara-acara hiburan di mana acara-acara hiburan yang diselenggarakan tersebut sering kali terdapat kerusuhan oleh karena itu penulis ingin mengetahui secara jelas tentang bagaimana pihak Kepolisian di wilayah Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dalam memberikan pengamanan pada suatu acara-acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Bengkalis.

### **2. Subjek dan objek penelitian.**

Subjek penelitian ini adalah kepolisian sektor Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sedangkan objek penelitian ini adalah peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada suatu acara hiburan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

### **3. Populasi dan sampel.**

Populasi dalam penelitian ini adalah kepolisian dan masyarakat dari pihak kepolisian sebanyak 4 orang, yaitu Kapolsek, Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, Kanit Patroli. Oleh karena jumlah masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 100 orang yaitu pihak RT, RW, Ketua Pemuda, Tokoh masyarakat, kepala Desa dan perangkat Kecamatan dengan teknik purposive sampling.

#### 4. Sumber data.

Sumber data dalam penelitian adalah :

- a. Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung dari kepolisian dan masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.
- b. Data skunder yaitu data yang di peroleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang masih berkaitan dengan masalah yang di teliti ini.

#### 5. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung tentang pranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada suatu acara hiburan.
- b. Wawancara yaitu penulis mengadakan wawancara langsung Kepada Polsek Rupert, pemuda, Remaja dan pemuka masyarakat.
- c. Angket yaitu penulis membuat beberapa term pertanyaan yang berkaitan dengan penulisan ini di sertai dengan jawabanya dan meyebarkan angket sebanyak 100 untuk masyarakat.

d. Studi Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, literatur traskip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

#### 6. Metode Analisa Data .

Penelitian pada hakikatnya merupakan salah satu kegiatan ilmiah baik untuk keperluan pengumpulan data, menarik kesimpulan atas gejala-gejala tertentu. Pada penulisan ini penulis menggunakan analisis data kualitatif. Dilihat dari tujuan analisis, maka ada hal yang ingin di capai dalam analisis data kualitatif, yaitu menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial dan memperoleh suatu gambaran yang tuntas terhadap proses tersebut, dan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data, dan proses suatu fenomena sosial itu.

Menganalisis proses berlangsungnya suatu fenomena sosial adalah mengungkapkan semua proses etik yang ada dalam satu fenomena sosial dan mendiskriptikan proses kejadian proses sosial itu apa adanya sehingga tersusun suatu pengetahuan yang sistematis tentang proses-proses sosial, realitas, dan semua atribut dari fenomena tersebut. Sedangkan menganalisis makna yang ada di balik informasi, data dan proses sosial suatu proses fenomena sosial yang di maksud adalah mengungkapkan peristiwa etik yaitu peneliti harus menaruh perhatian pada masalah penting yang di teliti dari objek yang di teliti. Sehingga terungkap suatu gambaran etik terhadap suatu peristiwa sosial yang sebenarnya dari fenomena sosial yang tampak.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Burhan Bugin, *penelitian kualitatif*, (jakarta: kencana, 2008) h.153



Penelitian kualitatif bersipat pemberian (deskriptif), artinya mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang di lihat dan di dengar serta di bacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain). Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data. Di antaranya melalui tiga tahap model air, yaitu reduksi data, penyajian atau display data.<sup>11</sup> Dan verifikasi. Reduksi data adalah data-data yang sudah di catat di seleksi apakah masing-masing data tersebut bisa di masukkan ke dalam konsep kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh yang di sebut dengan penyajian data atau display data.

#### 7. Metode Penulisan .

- a. Deduktif yaitu menggambarkan keadaan umum yang ada kaitanya dengan tulisan ini lalu di analisa dan di ambil kesimpulan secara kusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan data secara khusus kemudian di analisa dan di jelaskan secara umum.

#### **G. Sistematika Penulisan.**

Untuk lebih terarah penulisan ini maka di bagi kepada:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian yang berisikan biografi pendidikan, dan kehidupan serta sosial masyarakat.

---

<sup>11</sup> Setya Yuwana Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data, Dalam Burhan Bugin (Ed), Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h.93

BAB III :Tinjauan teoritis tentang kepolisian, yang terdiri dari: pengertian, Fungsi dan peranan kepolisian, tugas dan wewenang kepolisian, Konsep hukum pidana islam mengenai perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik, Hukuman atas tindak pidana hirobah (gangguan keamanan).

.BAB IV : Tinjauan fiqh jinayah terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat yang terdiri dari: Peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat, respon masyarakat terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan, Langkah-langkah yang di lakukan oleh pihak kepolisian mengantisipasi kerusuhan dan pandangan figh jinayah.

BAB V : Kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Karakteristik wilayah**

Kecamatan Rupert merupakan salah satu dari tigabelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Luas Kecamatan Rupert  $\pm 896,35 \text{ km}^2$  yang terdiri dari 4 kelurahan dan 8 desa. Kecamatan Rupert keadaan tanahnya datar yang mana letak geografisnya Desa atau Kelurahan di pesisir pantai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rupert utara/selat melaka
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan selat Rupert.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Rupert Utara/selat melaka.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bengkalis.

Adapun lokasi kantor kapolisian sektor Rupert terletak di jalan Inpres Kelurahan Batu Panjang berdirinya kantor Kepolisian Sektor Rupert sejalan dengan berdirinnya Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis yang mana polisi sektor Rupert berada di bawah Kapolres Bengkalis adapun jumlah anggota Kepolisian Sektor Rupert berjumlah sebanyak 18 (delapan belas orang) sebagai mana tabel dibawah ini:

**Tabel II.1**  
**Struktur Tipe Rural Kapolsek Rupat**  
**Kabupaten Bengkalis**

No	NAMA	JABATAN
1	SYAHRUDDIN	KAPOLSEK
2	IRDIAN, SH	KANIT PROPOS
3	BUDI HENDRA	KAS IUM
4	SYAFRIZON	KASI HUMAS
5	HASNAH	AGT SIUM
6	RIO MARADONA	BAUR TAHTI
7	H. ABS DASOPANG	KA SPK I
8	DAMRUS YUS	KA SPK II
9	SYAFRUDDIN, SY	KA SPK III
10	SUMIADI	KANIT INTEL
11	RUDY SIRAIT, SH	KANIT RESKRIM
12	SHUIRTA	KANIT BINMAS
13	BUHA PURBA, SH	KA POS POLI
14	SUPRAPTO	KANIT SUBHARA
15	ASBEN HOTAPEA	BA POLSEK
16	AHMAD FAUZI	AGT POSPOL
17	BAMBANG H	BA INTEL
18	ANGGA BAYU P	BA INTEL

Sumber: Kantor Polsek Rupat 2010

### **B. Jumlah penduduk.**

Penduduk merupakan unsur yang paling penting dalam pembangunan, baik sebagai objek pembagunan maupun sebagai subjek pembagunan itu sendiri. Sebagai mana yang telah di Prioritaskan bahwa faktor penduduk merupakan modal dasar dalam pelaksanaan pembagunan. Dengan ketetapan tersebut berarti bahwa aspek penduduk yang memberikan harapan sebagai salah satu sumber potensial yang akan mengerakkan dan yang akan di gerakkan dalam suatu proses pembagunan.

Penduduk di Kecamatan Rupat berjumlah sekitar 31.418 jiwa. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa Kecamatan Rupat terdiri atas 4

kelurahan dan 8 Desa, di mana jumlah penduduk yang paling dominan terdapat di desa Pengkalan Nyirih yaitu 4.571 jiwa dan jumlah penduduk terendah adalah di Desa Darul Amal yaitu sebanyak 1.246 jiwa, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel II.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Berdasar**  
**Kelurahan Di Kecamatan**

No	Desa/kelurahan	Jenis kelamin		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
		Laki-laki	Perempuan		
1	Batu Panjang	2.844	1.708	4.552	14
2	Terkul	1.633	1.712	3.345	11
3	Pergam	958	922	1.880	6
4	Tanjung Kapal	1.666	1.522	3.188	10
5	Darul Aman	651	595	1.246	4
6	Sukarjo Mesim	657	607	1.264	4
7	Teluk Lecah	1.633	1.776	3.409	11
8	Parit Kebumen	708	782	1.490	5
9	Makeruh	675	689	1.364	4
10	Sungai Cingam	1.163	1.164	2.327	7
12	Pangkalan Nyirih	2.348	2.223	4.571	15
Jumlah		16.382	15.036	31.418	100

Sumber : Kantor Camat Rupert, 2010

Dari Tabel di atas memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak apabila di bandingkan dengan jenis kelamin perempuan.

### C. Sarana pendidikan

Faktor pendidikan pemegang sarana penting dalam pembangunan. Berkualitasnya pendidikan masyarakat akan membawa dampak yang sangat positif terhadap kemajuan dalam wilayah itu sendiri. Pendidikan juga dibutuhkan untuk menciptakan generasi yang unggul pada masa yang akan datang sehingga mampu bersaing di Era Globalisasi.

Dalam beberapa Dekade ini dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di Kecamatan Rupert telah menyadari arti pentingnya dari sebuah pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini, di mana masyarakat telah mengenyam pendidikan Formal.

**Tabel II.3**  
**Komposisi penduduk menurut pendidikan**  
**di Kecamatan Rupert**

NO	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak/ belum pernah sekolah	5.766	18,4
2	Tidak/ belum tamat SD	5.858	18,6
3	Tamat/SD/MI/Sederajat	7.001	22,3
4	Tamat SLTP/MTS/Sederajat	6.530	20,8
5	Tamat SMU/SMA/SMK/Sederajat	5.248	16,7
7	Tamat SI	357	1,1
8	Tamat S2/S3	2	0
Jumlah		31.418	100

Sumber : kantor Camat Rupert, 2010

Pendidikan akan dapat terlaksana dengan maksimal apabila didukung oleh sarana yang memadai. Sarana pendidikan yang tersedia di kecamatan Rupert sebanyak 61 unit kecuali Perguruan Tinggi, di nilai cukup untuk menunjang pendidikan masyarakat.

**Tabel II.4**  
**Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Di Kecamatan Rupert**

No	Sarana pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tk (Taman Kanak-kanak)	4	2
2	SD ( Sekolah Dasar)	30	46
3	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	6	7
4	MTS (Masdrasah Tsanawiyah)	7	8
5	SMU (Sekolah Menengah umum)	6	7
6	MA (Madrasah Aliyah)	4	3
7	MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah)	19	27
Jumlah		76	100

Sumber: kantor camat rupert, 2010

#### **D. Kehidupan beragama**

Memeluk agama merupakan hak asasi manusia dalam artian manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing, sebagaimana juga telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) “ Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaan nya masing-masing”.

Pada umumnya masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rupert yaitu sekitar 25.439 Jiwa atau 81 %, terlihat bahwa mayoritas memeluk Agama Islam, akan tetapi ada juga yang beragama Kristen, Buddha, Katolik, dan konghucu. Agama yang paling minoritas adalah agama katolik yakni sebanyak 408 jiwa atau 1% untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel II.5**  
**Jumlah Pemeluk Agama Di Kecamatan Rupert**

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	25.439	81
2	Kristen	1.167	4
3	Buddha	3.920	12
4	Katolik	408	1
5	Konghucu	484	2
Jumlah		31.418	100

Sumber: Kantor Camat Rupert, 2010

Untuk menjalankan Ritual Beragama, sangat perlu di dukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Adapun sarana yang di maksud yakni berupa tempat peribadatan. Banyaknya tempat peribadatan di Kecamatan Rupert dapat di lihat di tabel di bawah ini:

**Tabel II.6**  
**Jumlah Sarana Peribadatan Di Kecamatan Rupert**

No	Sarana Ibadah	Jumlah ( Buah)	Persentase (%)
1	Masjid	42	44
2	Musholla	42	44
3	Gereja	7	7
4	Vihara	4	4
5	Pura	1	1
Jumlah		96	100

Sumber kantor camat Rupert, 2010

Dari tabel di atas memperlihatkan adanya keseimbangan sarana peribadatan umat Islam yang tersedia yakni antara Masjid dan Musholla sebanyak 42 buah atau 44%. Sedangkan sarana peribadatan Agama yang lainnya sangat minim sekali.

#### **E. Mata Pencaharian Masyarakat.**

Untuk mata pencaharian yang ada di Kecamatan Rupert pada umumnya lebih banyak berkebun yakni sebanyak 3.344 Jiwa atau 44% untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut

**Tabel II.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat**  
**Di Kecamatan Rupert**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Pertanian	1.693	22
2	Perkebunan	3.344	44
3	Peternakan	492	6
4	Perikanan	680	9
5	Kehutanan	118	2
6	Industri	162	2
7	Perdagangan	528	7
8	Pegawai Negeri Sipil	230	3
9	Tenaga Honorer	301	4
10	TNI/POLRI	27	0
11	Jasa –Jasa lainnya	107	1
Jumlah		7.682	100

Sumber kantor camat Rupert, 2010



### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERANAN KEPOLISIAN**

##### **A. Pengertian**

Keluarnya POLRI ( Polisi Republik Indonesia) dari ABRI ( Angkatan bersenjata republik indonesia) maka POLRI bukan lagi berstatus militer, tetapi pegawai Negeri dengan berstatus sipil yang di persenjatai, di beri tugas dan kewenangan kepolisian yang di atur dalam Undang-Undang tersendiri, serta dalam pembinaan kepegawaianya bersipat otonom. Dalam status tersebut, maka prajurit Polri akan lebih tepat di sebut sebagai pegawai POLRI atau POLISI.

Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum . kata polisi dapat merujuk dari salah satu tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi dapat kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Republik Indonesia atau POLRI atau Kepolisian Daerah atau Polda, sedang arti Polisi Sebagai Fungsi atau “Kata Kerja” berasal dari bahasa inggris “*to police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi, segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.<sup>1</sup>

Polisi merupakan suatu organisasi, perlengkapan dan latihan bagi Dinas Kepolisian serta sikap dan kebiasaan-kebiasaan dalam Dinas Kepolisian adalah sangat penting bagi cara dalam sistem peradilan pidana berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Emma Yulli Hastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, ( Jakarta : Esensi Erlangga Group, 2008) Cet. Ke 12, h.3.

<sup>2</sup> Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: cv. Rajawali,1984), h.27

Kepolisian segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. dan pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.<sup>3</sup> kepolisian pada intinya adalah aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan keamanan masyarakat. Selain itu juga, dalam pasal 7 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum kepolisian Negara Republik Indonesia di sebutkan : “penanggung jawab daerah hukum kepolisian adalah”:

- a. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia untuk wilayah hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Kepala Kepolisian untuk Daerah untuk Wilayah Provinsi
- c. Kepala kepolisian Resort untuk wilayah Kabupaten/Kota.
- d. Kepala kepolisian Sektor untuk wilayah kecamatan.<sup>4</sup>

## **B. Fungsi Dan Peranan Kepolisian**

### **1. Fungsi Kepolisian**

Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam Struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegak hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan

---

<sup>3</sup> Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta : visi media, 2008), cet. 1, h,8

<sup>4</sup> *Ibid*, h.176.

maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan tentram.

Sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di sebutkan tentang fungsi kepolisian yaitu :” fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat .<sup>5</sup> fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegak hak asasi manusia, hukum dan keadilan.

## **2. Peranan kepolisian**

Sebagaimana dalam pasal 4, kepolisian Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat penegak hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat , dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (2) menyatakan, kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya.<sup>6</sup>

Sebagai alat perlengkapan Negara (aparatur negara) Polisi bertanggung jawab melaksanakan sebagian dan dari tugas pemerintah sehari-hari, yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan

---

<sup>5</sup> *Op. Cit*, h,10.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 13.

polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi.

#### **a. Polisi sebagai penegak hukum**

Masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun ada warga yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan kejahatan tersebut dan menangkap pelakunya, terutama kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Polisi yang di gambarkan di atas adalah sebagai “penegak hukum” (law enforcer) dan sebagai “polisi memerangi kejahatan” (crime fighter). Khususnya sebagai crime fighter terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius, masyarakat mengharapkan polisi berperan sebagai proaktif crime fighter. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan.<sup>7</sup>

#### **b. Polisi Sebagai Pengayom**

Fungsi polisi dalam memelihara keteraturan, sebagai pengayom berada pada perbatasan antara perilaku warga masyarakat yang bersipat kriminal dengan yang bersipat non kriminal. Di sini pula terdapat keadaan peristiwa di mana polisi harus “bertindak menurut penilainya sendiri”, polisi harus membuat keputusan individual dan tidak menunggu komando.

Dalam pemahaman seperti ini, fungsi polisi adalah “megatasi situasi” . disina pula peranan polisi dalam memecahkan masalah di lakukan baik melalui

---

<sup>7</sup> Redaksi dan yayasan obor indonesia, *op. Cit.*, h. 75-76.

penegakan hukum, maupun dengan cara lain, sekedar ancaman dan paksaan (tampa melakukan kekerasan) ataupun dengan menunjukkan simpati dan pegertian (tidak saja pada korban, tetatapi juga pada pelaku). Istilah polisi yang berperan sebagai “memecahkan masalah masyarakat” adalah dalam kaitanya dengan fungsinya dapat mengatasi setiap situasi yang memerlukan bantuanya (sebagai pengayom).<sup>8</sup>

### **C. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

#### **1. Tugas kepolisian**

##### **A. Tugas pokok kepolisian**

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan pancasila dan undang-undang 1945.

Pemelihara keamanan dalam negeri merupakan salah satu tugas dari kepolisian repuplik indonesia, dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi kepolisian Negara Repuplik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat di lakukan oleh kepolisian Negara Repuplik Indonesia selaku alat Negara yang di bantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Repuplik Indonesia mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 77.



1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Rumusan pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama-sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan di terapkan sangat tergantung pada situasi masyarakat dengan lingkungan yang di hadapi, karena pada dasarnya tugas pokok tersebut di laksanakan secara keseluruhan, di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus didasari norma hukum, megindahkan Norma Agama, Kesopanan dan Kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sedangkan dalam pasal 14 ayat (1) undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Repuplik Indonesia bahwa : (1) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Repuplik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan, pengaturan, penjagaan ,pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Meyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina, masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan Perundang-Undangan.
- d. Turut serta dalam membina hukum nasional.

---

<sup>9</sup> *Ibid* h, 20.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, peyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan peyidikan dan peyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Meyelenggara identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratoriaum porensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan kepolisian.

Ketentuan Undang-Undang Hukum acara pidana memberikan peranan utama kepada pihak kepolisian Negara Repuplik Indonesia dalam peyidikan dan peyelidikan sehingga secara umum di berikan kewenangan untuk melakukan peyelidikan dan peyelidikan pada semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan mengurangi kewenangan yang di miliki oleh peyidik lainya sesuai dengan peraturan Perundang –Undangan yang menjadi dasar Hukumnya masing-masing. peyelenggara idetifikasi kepolisian di maksud untuk kepentingan peyidikan tindak pidana dan dan pelayanan identifikasi Non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lainya lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian . adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, yang di perlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas polisi.

- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta
- l. Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.<sup>10</sup>

Masalah-masalah sosial yang ada dalam sebuah masyarakat belum tentu sama dengan yang terdapat dalam masyarakat lainnya, dengan demikian tugas-tugas yang harus dijalankan oleh polisi sesuai dengan fungsinya akan dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya, begitu juga masalah-masalah sosial yang ada dan yang dihadapi oleh suatu Negara berbeda dengan negara yang lainnya. Sehingga bidang-bidang tugas kepolisian yang dijalankan oleh polisi berbeda-beda coraknya.

Tugas kepolisian yang semula dilakukan sebagai seni (craft) dan dilakukan atas selera orang perorang dan petugas kepolisian telah menjadi tugas-tugas profesi atau tugas-tugas keahlian sesuai dengan perkembangan masyarakat serta akan adanya pelayanan polisi yang profesional dan terpercaya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 20-22

<sup>11</sup> Redaksi Dan Yayasan Obor Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, (Jakarta: Buku Obor, 2000) h.57.

## **B. Tugas pembinaan.**

Selain tugas pokok kepolisian di atas masih ada bagian tugas yang di sebut dengan bagian tugas pembinaan, yakni tugas-tugas dalam rangka memberi bimbingan teknis maupun taktis dalam menjalankan fungsi kepolisian. Tugas pembinaan ini di berikan kepada lembaga atau masyarakat potensial yang berdasarkan Undang-Undang di berikan tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi kepolisian, yang dalam istilah lain sebagai alat kepolisian khusus.

Sesuai dengan pasal satu keputusan Presiden NO. 372 tahun 1962, yang di maksud dengan alat kepolisian khusus adalah alat atau badan sipil pemerintah yang oleh atau kuasa hukum di berikan wewenang untuk melakukan tugas-tugas kepolisian dibidangnya masing-masing. Tugas alat kepolisian khusus ada kesamaan dan perbedaannya dengan tugas-tugas yang dieban oleh POLRI, perbedaan pada lingkup kewenangannya yang terbatas pada bidang masing-masing, antara lain meliputi penerangan dan peyuluhan, pencegahan dan peniadakan. Dengan demikian tugas-tugas kepolisian yang di emban alat kepolisian khusus berdasarkan peraturan Perundang-Undangan di bidangnya dengan mencakup tugas-tugas pengawasan dan peyedikan di bidangnya masing-masing.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang POLRI, meyebutkan bahwa: pegemban fungsi kepolisian adalah kepolisian Negara Repuplik Indonesia yang di bantu oleh:

- a. Kepolisian khusus;
- b. Peyidik pegawai negeri sipil; dan atau
- c. Bentuk-bentuk pegamanan swakarsa.

Pegemban fungsi kepolisian di atas dilaksanakan sesuai dengan dengan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukumnya. Apa yang dilaksanakan oleh kepolisian khusus, peyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dan pengemban bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa bersipat bantuan fungsional dan tidak bersipat Struktural Hirarkis. Kepolisian khusus yang dimaksud adalah Instansi dan atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa Undang-Undang (peraturan Perundang-Undangan) di beri wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknis masing-masing. Seperti polisi kehutanan di atur dalam Undang-Undang NO. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas dalam lingkungan kuasa tempat meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja lingkungan pendidikan bentuk pengamanan swakarsa ini seperti contoh yang dilakukan oleh satuan pengamanan (SATPAM), keamanan lingkungan (SISKAMLING), maupun di lingkungan kampus (MENWA) dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## **2. Wewenang kepolisian**

Pada pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia:

- (1) Dalam rangka meyelenggarakan tugas–tugas tersebut sebagaimana di maksud dalam pasal 13 dan 14 kepolisian Republik indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan pengaduan;

---

<sup>12</sup> Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008), Cet. Ke-2, h.120.

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan dan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam ruang lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Meyelenggarakan pusat informasi kriminal;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dalam pelaksanaan putusan pengadilan instansi lainnya, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan berwenang:

- a. Memberikan izin dan mengawasi keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- b. Meyelenggarakan identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor.
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam meyidik dan membrantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah indonesia dengan koordinasi instansi terkait.
- j. Mewakili pemerintah repuplik indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> *Opcit*, h.25.

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa atau tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat. Tetapi dalam wewenang di atur dalam pasal 19 undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan Norma Hukum dan megindahkan Norma Agama, Kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana di maksud dalam ayat (1), kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.<sup>14</sup>

#### **D. Prosedur Pengamanan Kepolisian**

Tugas pengamanan dalam suatu acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat merupakan kewajiban dari pihak kepolisian di mana kepolisian merupakan suatu alat negara yang mempuyai kewajiban untuk menjaga kemanan negara dari gangguan-gangguan dari dalam tentang adanya tindak pidana yang akan terjadi yang tentunya akan mempengaruhi keadaan aman, tertib dan kondusif yang menjadi keinginan dari masyarakat indonesia.

Peran aktif dari pihak kepolisian di laksanakan oleh petugas-petugas yang di turunkan atau di tugaskan dalam melakukan pengamanan yang berupa pengawasan ataupun penjagaan terhadap suatu acara hiburan yang sebelumnya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 33-34



dari pihak kepolisian memberi izin untuk menyelenggarakan acara yang di maksud. Jumlah dari petugas yang akan di turunkan oleh pihak kepolisian biasanya di sesuaikan dengan kapasitas jumlah penonton tempat dan waktu.

Setelah permohonan perizinan di setujui oleh kepala kepolisian, maka melalui bagian operasional aparat kepolisian menurunkan petugas-petugas untuk melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap acara hiburan. Untuk acara hiburan yang biasa di selenggarakan masyarakat dalam rangka perayaan pernikahan ataupun ulang tahun jumlah petugas polisi yang di turunkan ke lapangan atau tempat acara hiburan seperti acara dangdut atau musik bend yang berkapasitas kecil minimal 1 pleton (delapan orang), dari 8 orang termasuk kemandan pleton, tetapi untuk tempat –tempat yang di anggap rawan terjadi kerusuhan kemungkinan besar jumlah petugas di tambah atau dengan kata lain jumlah petugas dapat di sesuaikan dengan keadaan dan situasi apabila terjadi insiden-insiden yang sifatnya mengganggu ataupun mengancam jalannya acara hiburan petugas di lapangan dengan sigap dan tanggap melakukan penanganan terhadap gangguan tersebut dan melakukan langkah lainya yang di perlukan untuk meredam atau mengatasi yang mana lebih di kenal dengan istilah diskresi yaitu kebijaksanaan, keluasan atau kemampuan untuk memilih rencana kebijaksanaan atau mempertimbangkan bagi diri sendiri.<sup>15</sup>

Apabila situasi dan kodisi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan lagi acara tersebut maka komandan pasukan yang ada di lapangan dapat menghentikan acara tersebut demi keselamatan para penonton atau pengunjung.

---

<sup>15</sup> Hadi Utomo Warsito, *Hukum Kepolisian Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005) Cet Ke-1 h.106

**E. Konsep hukum pidana Islam mengenai perlindungan masyarakat dalam situasi damai dan konflik.**

Perang atau konflik bersenjata adalah suatu perkelahian antara segolongan manusia dengan golongan manusia yang lain, dengan mempergunakan segala daya dan senjata yang ada pada pihaknya masing-masing, dengan tujuan untuk menghancurkan lawannya sehingga lawan itu bertekuk lutut.

Apabila perang atau konflik bersenjata itu terjadi antara kelompok muslim dan non muslim yang kemudian pihak non islam yang kalah maka konsep hukum islam terhadap penduduk yang mendiami suatu negara yang kalah dalam perang yang beragama islam adalah membayar pajak (jizyah). Tugas Hisbah yaitu suatu tugas keagamaan, masuk kedalam bidang amar Ma'ruf Nahi Mungkar, tugas ini merupakan tugas fardhu yang harus di laksanakan oleh penguasa. Oleh karenanya penguasa harus mengangkat orang-orang yang di pandang cakap untuk tugas ini.<sup>16</sup>

Konsep agama islam bagi kehidupan manusia merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat yang di maksud berdasarkan firman Allah dalam Surah Al-Anbiya' Ayat 107 sebagai berikut:

“dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam<sup>17</sup>.”

Ayat Al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa ajaran agama islam bukan hanya merupakan rahmat dan kasih sayang bagi bagi orang islam melainkan juga merupakan rahmat dan kasih sayang kepada non islam, bahkan seluruh makhluk

<sup>16</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003)  
Cet Ke-1 Hal. 57

<sup>17</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 331

dan isi alam ini, oleh karena itu mewujudkan kasih sayang dalam perilaku hidup setiap muslim tidak di batasi oleh dinding agama dan keyakinan, bahkan perwujudan kasih sayang di maksud hendaknya sampai juga keseluruhan alam, hewani, nabati, dan jamadi.

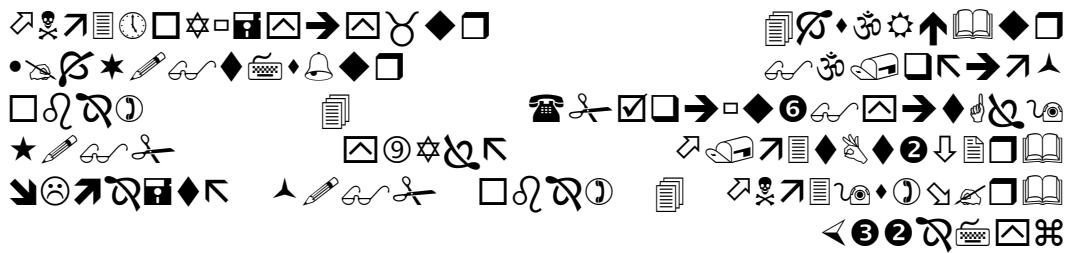
Setiap muslim hendaknya memuliakan tamunya, menghormati tetangganya, menolong kepada orang yang meminta tolong, membantu orang yang meminta bantuan baik muslim maupun non muslim, perbuatan tersebut adalah perbuatan terpuji dan termasuk ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah SWT. Demikian pula sebaliknya menyakiti orang yang tidak bersalah, baik muslim maupun non muslim adalah di larang oleh Allah SWT, karena termasuk perbuatan dosa.

Pada saat nabi Muhammad SAW. Bersama para sahabat berkumpul, tiba-tiba ada mayat yahudi yang di bawa lewat di hadapan Rasulullah SAW, dan para sahabatnya, maka rasul dan para sahabat serentak berdiri. Diantara sahabat yang berdiri tersebut, ada yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa mayat yang lewat itu adalah mayat orang yahudi, tetapi Rasulullah tetap berdiri dan bersabda, bahwa mereka adalah manusia juga yang berhak mendapat penghormatan.<sup>18</sup>

Contoh yang di ungkapkan di atas, pada pokoknya di atas adalah memperlihatkan ajaran islam mengenai tsamuh di masyarakat majemuk sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hujarat Ayat 13 sebagai berikut:



<sup>18</sup> Ali zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet Ke-2, h. 128.



“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa<sup>19</sup>.”

#### **F. Hukuman atas tindak pidana hirobah (gangguan keamanan).**

menurut Abu Hanifah, As-Syafii, Ahmad Bin Hanbal dan Ulama Syi’ah Zaidiyah, hukuman atas tindak pidana hirabah berbeda-beda, tergantung pada perbuatan yang di lakukan, sebuah tindak pidana hirabah jika tidak keluar dari empat bentuk:

- a. Menakut-nakuti orang di jalan tanpa mengambil harta atau membunuh orang .
- b. Hanya mengambil harta, tidak yang lain.
- c. Membunuh saja, tidak yang lain.
- d. Mengambil harta dan membunuh.

Menurut para fuqaha masing-masing hukuman ini mempuyai hukuman khusus, imam malik berpendapat bahwa imam (penguasa atau kepala negara) berhak memilih hukuman atas muharib dari beberapa hukuman yang ada di dalam Nas (aturan) selama si muharib tindak membunuh. Jika si muharib

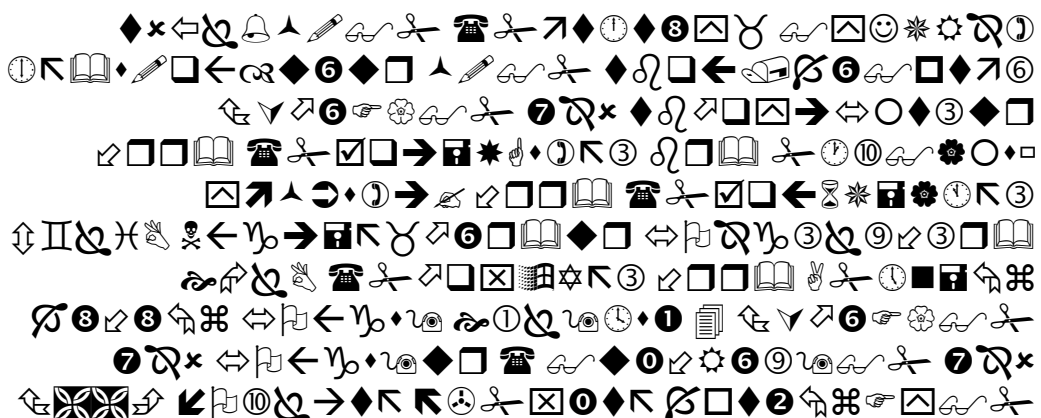
---

<sup>19</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h. 517

membunuh maka dia di jatuhi hukuman mati atau di bunuh dan di salib. Imam hanya memilih dua pilihan ini tidak ada pilihan lainnya.

Ulama Zahiriyah berpendapat bahwa imam Berhak memilih hukuman dalam setiap keadaan, apapun jenis tindak pidananya, baik muharib mebunuh maupun tidak.<sup>20</sup> Prinsip penjatuhan Ta'zir, terutama dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh Ulil Amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumnya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat yang mengganggu ketertiban atau kepentingan umum.<sup>21</sup>

Perbedaan pendapat ini karena perbedaan para fuqaha menafsirkan Firman Allah SWT dalam Surat yang berkaitan dengan ta'at Al-Maidah Ayat 33:



“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya<sup>22</sup>.”

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Muassasah Ar-Risalah), Cet Ke-1, h. 205.

<sup>21</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000) Cet Ke-1 Hal, 142

<sup>22</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 113

**BAB IV**  
**TIJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP PERANAN KEPOLISIAN**  
**DALAM MEMBERIKAN PENGAMANAN PADA ACARA HIBURAN**  
**YANG DI SELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

**A. Peranan dari pihak Kepolisian Dalam Memberikan Pengamanan Pada Acara Hiburan Yang Di Selenggarakan Oleh Masyarakat.**

Menurut Junklak Kapolri NO POL/08/IV/1985 tentang pengamanan Intilijen kepolisian bahwa jenis hiburan yang harus mempunyai izin penyelenggaraan antara lain:

1. Pesta yang berupa pekan raya, festival dan bazar serta kegiatan sejenisnya.
2. Keramaian yang berupa pasar malam, pameran, pertunjukan serta kegiatan sejenisnya.
3. Kegiatan masyarakat baik yang bersipat umum, khusus, tertutup, terbuka yang intinya mengundang keramaian.

Menurut kapolsek Rupert AKP. Syahrudin siapa saja bisa mengajukan izin menyelenggarakan suatu acara hiburan, antara lain:

1. Perorangan.
2. Organisasi politik.
3. Organisasi non politik.
4. Lembaga keilmuan.
5. Badan hukum.

Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan izin antara lain:

1. Di laksanakan secara tertulis.

2. Memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu, penanggung jawab, pembicara atau artis bintang tamu dan perkiraan jumlah undangan atau penonton yang hadir.
3. Permohonan di tanda tangani oleh pimpinan penyelenggara atau pimpinan organisasi, badan hukum.
4. Bila permohonan izin dari organisasi selain di tanda tangani oleh ketua di lampiri juga dengan surat keputusan pembentukan panitia yang di tanda tangani oleh ketua organisasi yang bersangkutan.
5. Surat permohonan di ajukan kepada pejabat yang berwenang memberikan izin.
6. Permohonan izin di lampiri dengan:
  - a. Jadwal acara.
  - b. Susunan panitia penyelenggara.
  - c. Daftar pengurus organisasi apabila yang mengajukan izin adalah suatu organisasi.
  - d. Jumlah perkiraan penonton atau pengunjung atau tamu undangan yang akan hadir.
  - e. Nama-nama artis yang akan mengisi acara.
  - f. Di lampiri oleh AD/RT organisasi atau badan hukum (apabila yang mengajukan suatu organisasi atau badan hukum.
  - g. Akte pendirian organisasi atau badan hukum.
  - h. Proposal.

Dasar hukum perizinan antara lain:

1. Junklak Kapolri NO POL/08/1985 tentang pengawasan intilijen kepolisian.
2. Surat edaran bersama Dirjen Pariwisata dan KAPOLRI No. 04/EDR/XII/1988 tentang peyelenggaraan keramaian.
3. Peraturan Menaker RI NO. 03/MENAKER/1990 tentang perizinan tenaga kerja asing.
4. Junklak KAPOLRI No Pol/28/VII/1990 tentang peyelenggaraan perizinan.
5. Keputusan bersama Mendagri dan Menhankam NO.153/1995. No KEP/12/XII/ 1995. Tentang pertunjukan perizinan keramaian.
6. UU No.3 tahun 1961 tentang ketentuan pokok POLRI

Keadaan yang aman dan tentram merupakan dambaan bagi setiap orang, dengan keadaan yang aman orang bisa melakukan aktifitasnya tanpa ada gangguan. Bagi masyarakat keamanan merupakan hal yang penting karena begitu banyak aktivitas-aktivitas yang berada di lingkungan masyarakat membutuhkan adanya suatu pengamanan. Dan sudah sewajarnya Negara menjamin keamanan bagi seluruh rakyatnya, hal ini tertuang di dalam nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang dasar 1945 dan pancasila, untuk mewujudkan hal hal tersebut lembaga kepolisian sebagai lembaga yan ada dalam pemerintahan dan sebagai alat negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri yang tertuang dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Repuplik Indonesia pasal 5 ayat 1.



Adapun peranan kepolisian yang terdapat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional, kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia aparat kepolisian mempunyai kewajiban untuk memberikan pengamanan pada masyarakat dan begitu pula masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pengamanan pada setiap aktivitas-aktivitas yang akan di adakan yang bersipat rawan atau tindakan kejahatan menurut R. Abdusslam keamanan adalah, keadaan yang bebas dari kerusakan dan kehancuran yang mengganggu keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan dan kekhawatiran sehingga ada rasa kepastian dan rasa kepastian dari

jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran Norma-Norma Hukum.

Untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat serta untuk memenuhi kewajiban dalam memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat kepolisian dalam mengemban tugasnya oleh bentuk-bentuk pengamanan swakarsa di mana dalam hal ini tertuang dalam pasal 3 huruf (c) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan bentuk –bentuk pengamanan swakarsa menurut Dr. Sadjijono, SH, M.Hum adalah suatu bentuk pengamanan yang di adakan atas kemauan, kasadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengakuan dari Polri, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang pengamanan, bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ini memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam lingkungan kuasa tempat yang meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan bentuk kongkritnya antara lain dalam lingkungan kerja terdapat satuan pengamanan (SATPAM) perusahaan, Bank dan lain-lain, dalam lingkungan pemukiman terdapat (SISKAMLING) atau Linmas dan dalam lingkungan pendidikan terdapat satuan pengamanan (SATPAM) di lingkungan sekolah atau Resimen Mahasiswa (MENWA) yang terdapat di lingkungan Kampus.

Menurut Syahrudin sebagai Kapolsek Rupert peran kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan menyatakan yang mana pihak kepolisian melakukan pendeteksian kerawanan-kerawanan apa saja yang timbul akibat acara hiburan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan peranan tersebut juga

di lakukan bersama-sama dengan pihak masyarakat yaitu ketua Pemuda, Tokoh Masyarakat, RT, RW dan Kepala Desa setempat.<sup>1</sup>

Jadi, yang menjadi fungsi dan peranan Polisi Sektor Rupert adalah sebagaimana salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi dan perannya harus memperhatikan semangat penegak Hak Asasi Manusia (HAM), Hukum dan keadilan.

Adapun pengamanan yang di lakukan oleh pihak kepolisian ada beberapa bentuk yaitu:

1. Pengamanan tertutup, yaitu pengamanan yang di lakukan oleh intelkam (Intilijen Keamanan) yaitu di maksud adalah petugas polisi yang berpakaian bebas atau pakaian biasa tidak menggunakan pakaian seragam atau *unifrom* kepolisian, tugas kepolisian dalam pengamanan tertutup adalah melakukan peyidikan, pengawasan, pengamatan terhadap situasi ruang lingkup dan sekitarnya untuk mendapatkan data-data yang dapat memicu kerusuhan.<sup>2</sup> Tugas reskrim (reserce kriminal) dalam pengamanan tertutup yaitu melakukan peyelidikan dan bisa melakukan upaya paksa dalam rangka menekan terjadinya kriminalitas, yang di maksud upaya paksa yaitu melakukan peyelidikan dan bisa melakukan upaya paksa dalam rangka menekan terjadinya kejahatan.

---

<sup>1</sup>AKP Syahrudin, Kapolsek, *Wawancara*, Di Kantor Polsek Rupert, tgl 3 agustus 2011.

<sup>2</sup> Sumiadi, Anggota Kepolisian, *Wawancara*, Kantor Polisi Sektor Rupert, tgl 3 Agustus

2. Pengamanan terbuka yaitu pengamanan yang dilakukan oleh petugas polisi yang menggunakan seragam atau *uniform* kepolisian, tugas dari pengamanan terbuka antara lain:
  - a. Melakukan pengawasan di lokasi.
  - b. Melakukan pengamanan terhadap benda, orang dan sebagainya.

Sedangkan yang menjadi tugas di tingkat polisi Sektor adalah:

1. Setra pelayanan kepolisian
2. Satuan reserse dan kriminal
3. Satuan patroli
4. Pos polisi, dan
5. Pembinaan dan ketertiban dan keamanan masyarakat.<sup>3</sup>

Adapun suatu acara hiburan sudah seharusnya diberikan pengamanan sebab dalam penyelenggaraan acara hiburan bertujuan untuk menghibur serta mengundang masyarakat ataupun orang banyak dan sudah barang tentu pihak penyelenggara mengharapkan acara yang diselenggarakan berjalan dengan lancar, aman dan tertib, untuk mewujudkan keadaan yang lancar, aman dan tertib, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan penyelenggara dapat meminta bantuan dari pihak kepolisian.

Suatu acara hiburan yang mengundang banyak orang sudah barang tentu juga mengundang bermacam-macam jenis tindakan kejahatan yang sipatnya sangat merugikan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Irdian, SH, Anggota Kepolisian, *Wawancara*, Kantor Polisi Sektor Rupert, tgl 4 Agustus 2011

Untuk mengetahui apakah acara hiburan yang di laksanakan di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sering tidaknya terjadi kerusuhan dapat di lihat tabel angket di bawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Apakah Acara Hiburan Yang Di Selenggarakan Di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Sering Terjadi Kerusuhan**

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Fresentase
1	Sering	77	77 %
2	Tidak Sering	23	23 %
3	Tidak Terjadi Kerusuhan	0	0 %
Jumlah		100	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat sering terjadi kerusuhan sebanyak 77 orang (77%), menyatakan tidak sering sebanyak 23 orang (23%), dan mayatakan tidak ada terjadi kerusuhan 0 orang (0%), dengan demikian berdasarkan data tersebut dapat di simpulkan bahwa acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat kecamatan rupa kabupaten bengkalis sering terjadinya kerusuhan.

Seorang ketua pemuda meyatakan: “adapun kejahatan yang sering terjadi jika acara hiburan di laksanakan adalah perkelahian antara para remaja yang mana perkelahian itu di sebabkan karena para remaja tersebut mengkonsumsi alkohol sehingga kurang akal sehatnya sebenarnya banyak kejahatan yang terjadi selain

perkelahian yaitu pencurian pengrusakan, dan pelecehan seksual dan banyak kemungkinan lain”<sup>4</sup>

Tindakan kejahatan yang di timbulkan pada acara hiburan antara lain:

1. Seperti kejadian pada hari Kamis 10 September 2009 yang mana dilaksanakan acara hiburan organ tunggal pada malam harinya dan pada saat acara tersebut berlangsung maka terjadilah perkelahian antara penonton yang mana perkelahian terjadi akibat pengaruh dari minuman alkohol yang di konsumsi oleh para pemuda kasus ini di lakukan oleh Bustami Alias Trubus Bin Zaini, pada hari Kamis tanggal 10 September 2009 sekitar jam 21.30 WIB bertempat di Jl. Bahari Gg Kampung Baru telah melakukan penganiayaan terhadap Erianto (korban) yang menyebabkan korban luka-luka. Perbuatan Bustami tersebut di lakukan dengan cara membacok benda tajam kepada korban dari belakang yang mengenai bahu sebelah kanan. Dan korban melakukan perlawanan tetapi sia-sia dan Bustami berhasil membacok korban untuk kedua kalinya di bagian punggung korban dan setelah itu korban jatuh terlungkup di atas tanah dan Bustami pergi meninggalkan korban dalam keadaan berlumuran darah dan senjata tajam yang di pergunakan oleh Bustami di buang ke dalam parit yang tidak jauh dari tempat kejadian. Maka akibat perbuatan Bustami tersebut korban tergeletak dan mengeluarkan darah yang banyak

---

<sup>4</sup> Abdullah, *Wawancara*, Ketua Pemuda Kecamatan Rupert, Tgl 28 Juli 2011.

maka korban langsung di larikan ke rumah sakit oleh beberapa orang yang menyaksikan kejadian tersebut.<sup>5</sup>

2. Para pemuda berpesta pora sambil mabuk-mabukan, yang akan dapat menyebabkan terjadinya tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pemuda itu sendiri.
3. Mengganggu keamanan lalu lintas yang mana para penonton terkadang parkir di jalan umum sehingga menyebabkan lalu lintas kurang baik/macet.
4. Terjadinya pelecehan seksual atau kejahatan asusila yang diatur dalam pasal 281-303 kitab undang-undang hukum pidana.
5. Pengrusakan barang atau benda yang diatur dalam pasal 406-412 kitab undang –undang hukum pidana. Dan tindak kejahatan yang lainnya yang sipanya sangat merugikan pihak bersangkutan. Yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

“terapi kejahatan yang paling sering terjadi dalam acara hiburan yang bertemakan musik adalah perkelahian serta pencurian terutama apabila acara hiburan itu diselenggarakan di perkampungan yang masih kental dengan nuansa emosional dan kelompok serta daerah-daerah yang rawan akan tindak kejahatan”<sup>6</sup>

Jadi dalam penyelenggaraan acara hiburan harus ada unsur pengamanan dalam hal ini yang paling besar pengaruhnya adalah pihak kepolisian.

“dalam pengamanan acara hiburan polisi harus bekerja sama dengan pihak setempat baik itu Ketua Dusun, Ketua Pemuda, ketua RW dan RT setempat dan

---

<sup>5</sup> Budi Sirait, Anggota Polisi, *Wawancara*, Kantor Polsek Rupert, Tgl 3 Agustus 2011

<sup>6</sup> AKP Syahrudin, klaposek, *Wawancara*, Kantor Polsek Rupert, Tgl 4 Agustus 2011.

saling berkomunikasi karena hal ini sangat penting karena untuk meperlancar jalannya acara hiburan yang di laksanakan supaya bisa mengantisipasi terjadinya kerusuhan yang terjadi. Dengan terciptanya komunikasi antara pihak masyarakat dan pihak kepolisian harapan untuk mewujudkan keadaan yang aman dan tertib dalam acara hiburan dalam acara hiburan yang berlangsung sangat besarnya kemungkinan, selain itu dengan lancarnya komunikasi tersebut kepolisian dapat dengan maksimal mungkin untuk mempersiapkan personil-personil yang di turunkan dalam proses pengamanan tersebut.”<sup>7</sup>

Dapat kita lihat bahwa secara garis besar suatu acara hiburan yang di laksanakan harus mendapatkan pengamanan yang extra ketat karena acara hiburan yang sipanya mengundang keramaian sudah barang tentu juga mengundang kejahatan hal ini karena di picu oleh para pemuda yang meyaksikan acara hiburan yang di selenggarakan tersebut.

#### **B. Respon masyarakat terhadap upaya dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan pada acara hiburan yang di selenggrakan oleh masyarakat.**

Untuk menegetahui respon masyarakat terhadap upaya dari pihak kepolisian dalam mengantisipasi kerusuhan yang terjadi pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat, maka penulis sajikan berasal dari wawaancara dan angket yang penulis lakukan dengan Kepolisian dan masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

---

<sup>7</sup> Budi Hendra, Anggota Polisi, *Wawancara*, Di Kantor Polsek Rupat, Tgl 4 Agustus 2011



**Tabel IV.2**  
**Respon Masyarakat Terhadap Pembinaan Dan Peranan Yang Di Lakukan**  
**Oleh Kepolisian Sektor Rupert Kabupaten Bengkalis**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Sangat Setuju	72	72,00%
2	Setuju	24	24,00%
3	Tidak setuju	4	4,00%
Jumlah		100 orang	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang sangat setuju sebanyak 72 orang (72%), dan 24 orang (24%) menyatakan setuju dan 4 orang (4,00%) menyatakan tidak setuju, dengan demikian berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa Peranan dari pihak kepolisian tersebut sebagian dari masyarakat memberikan Respon Positif terhadap pihak kepolisian Sektor Rupert dalam memberikan pengamanan pada acara yang dilaksanakan.

Walau demikian masih ada juga masyarakat yang tidak setuju pihak kepolisian memberikan penyuluhan dan peranan terhadap acara hiburan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 4 orang (4,00%). Bahari mengatakan: “saya tidak setuju di karenakan pihak kepolisian terkadang tidak berada di lokasi kejadian saat acara hiburan dilaksanakan sehingga setiap acara hiburan yang dilaksanakan banyak terjadinya kerusuhan”.<sup>8</sup>

Kerusuhan memang sering terjadi ketika acara hiburan dilaksanakan kerusuhan terkadang dilakukan oleh para pemuda. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan keresahan sosial sehingga kehidupan masyarakat tidak harmonis

---

<sup>8</sup> Bahari, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Rupert Desa Sei-Injab, tgl 2 Agustus 2011

lagi, jika di tinjau dari Hukum Pidana Islam perbuatan itu sangat bertentangan dengan hukum.

Di samping itu, ada beberapa faktor yang melatar belakangi terjadi kerusuhan yang dilakukan oleh para pemuda di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Faktor pendidikan

Dalam konteks ini sekolah/ pendidikan merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi remaja, pada umumnya remaja duduk di bangku sekolah menengah pertama yang lebih setingkat. Faktor pendidikan sangat mempengaruhi terhadap tingkah laku para remaja, dari penelitian ini, penulis dapati sebagian besar Remaja di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan umum, hal ini sesuai dengan di ungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Rupat dan juga sebagai kepala sekolah MTS Nurul Muhsinin, menurut beliau:

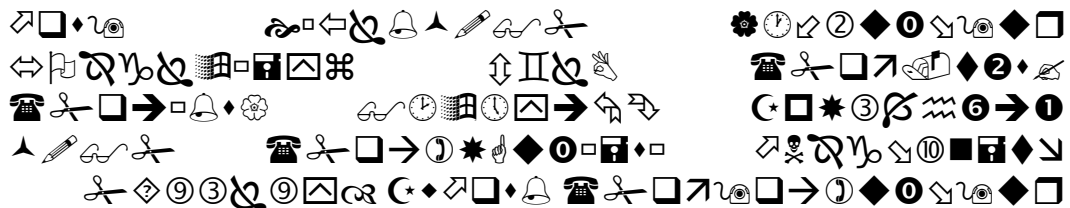
“Remaja di kecamatan rupat pada umumnya mendapatkan pendidikan di lembaga pendidikan umum, seperti SMA, SMP, mereka lebih berminat masuk ke pendidikan umum dari pada di sekolah Agama sehingga mereka kurang mengetahui pendidikan yang bersifat Agama, sehingga mereka sering melakukan tindak kriminal apatah lagi ketika acara hiburan di selenggarakan mereka berbondong-bondong pergi menyaksikan acara tersebut terkadang sampai mengkonsumsi alkohol”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Budit Am.a, Pd, *Wawancara*, Kepala Sekolah MTS Nurul Muhsinin, Tgl 5 Agustus 2011

Di samping itu banyak juga di antara ramaja atau pemuda itu sendiri tidak pernah mengenyam pendidikan.

Firman Allah SWT S. An-Nisa Ayat 9 :



“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar<sup>10</sup>.”

## 2. Faktor keluarga

Keluarga merupakan hal yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya remaja mendapatkan pendidikan yang pertama kali keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak/atau remaja dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan remaja, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan remaja, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif, karena sejak kecil anak di besarkan oleh keluarga dan seterusnya, sebagai besar waktunya di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya kejahatan itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Keluarga yang tidak mengenal tuhan, tidak harmonis, atau mempunyai tuntutan yang terlalu tinggi, tidak ada dorongan dan bimbingan bagi anak-

<sup>10</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 77

anaknya, tidak mengenal rasa cinta dan kasih sayang, kurang perhatian orang tua keuangan yang berlebihan atau kekurangan. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak secara kejiwaan atau secara emosi tidak berkembang dengan baik pada saat anak mencapai usia dewasa maka ia tidak bisa berinteraksi dengan baik di dalam lingkungannya, kurang mendapatkan ilmu-ilmu agama maka anak tersebut akan mengalami frustrasi. Akibatnya adalah anak akan merasa tidak puas terhadap keadaan dirinya dan lingkungannya.

Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya kejahatan dapat berupa keluarga yang tidak Normal (Broken Home) dan keadaan jumlah anggota keluarga terlalu banyak sedangkan ekonomi orang tuanya lemah. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh seorang pemuka agama, menurut beliau:

“keluarga mempunyai peranan yang penting terhadap anak yang mana kerusuhan yang sering terjadi itu terkadang di lakukan oleh para remaja yang kehidupan keluarganya kacau sehingga para anak-anak itu kurang di awasi terhadap pergaulan mereka sehingga mereka melakukan tindak kejahatan seperti perkelahian apabila acara hiburan di laksanakan apalagi acara yang di selenggarakan pada malam hari”<sup>11</sup>

### 3. Faktor pergaulan

Pada umumnya remaja suka mengadaptsikan dirinya dengan lingkungan, terutama sekali dengan teman-teman sebayanya, hal tersebut dapat memberikan dampak positif ataupun negatif pada remaja, remaja ingin memperhatikan dan mendapatkan tempat dalam kelompok teman-teman dan masyarakat, hal itulah

---

<sup>11</sup> Abu Bakar, Ketua RW, *Wawancara*, Rupert Desa Sungai Injab, Tgl 4 Agustus 2011.

yang mendorong remaja meniru apa yang di buat, di lakukan atau di pakai teman-temanya. Dalam menjalankan aktivitas-aktivitas agama, beribadah dan sebagainya biasanya remaja sangat di pengaruhi oleh teman-temanya.

Hal tersebut terjadi pula pada Remaja Kecamatan Rupert, yang mana sebagian besar remaja suka bergaul dengan teman-teman yang suka bertingkah laku tidak baik, sehingga membuat para remaja tersebut sering melakukan kesalahan-kesalahan bahkan menjerumuskan pada tindak kriminal. Adapaun faktor yang meyebabkan mereka bergaul dengan remaja yang bertingkah laku tidak baik di karenakan mereka mengalami konflik batin yang sulit untuk di pecahkan. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan seorang remaja, bahwasanya:

” saya bergaul dengan teman yang bertingkah laku tidak baik karena saya mengalami suatu masalah, di mana dengan adanya saya bergaul dengan mereka dan berhura-hura saya tidak mempunyai masalah lagi”<sup>12</sup>

**Tabel IV.3**

**Peyebab remaja melakukan kerusuhan pada acara hiburan**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentse
1	Mengkonsumsi alkohol	46	46,00%
2	Karena dendam	32	32,00%
3	Mengalami komflik batin	22	22,00%
	Jumlah	100 orang	100%

Berdasarkan Tabel di atas dapat di ketahui peyebab karena para remaja melakukan kerusuhan ketika acara hiburan di selenggarakan adalah di karenakan

---

<sup>12</sup> Subari, Remaja, *Wawancara*, Rupert Desa Sei-Injab, Tgl 4 Agustus 2011

mengonsumsi alkohol 46 orang (46,00 %), di sebabkan oleh dendam di antara para remaja sebanyak 32 orang (32,00%), dan sebanyak 22 orang (22,00%) menjawab karena mengalami konflik batin.

Dapat kita ketahui adapun penyebab yang paling dominan terjadinya kerusuhan saat acara hiburan di selenggarakan pada acara hiburan yaitu karena para remaja mengonsumsi alkohol sehingga para remaja hilang akal sehatnya dan sampai melakukan tindak kriminal seperti perkelahian.

Untuk lebih memperjelas tindakan kriminal yang di lakukan oleh para remaja Kecamatan Rupert pada saat acara hiburan di selenggarakan dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Hal-Hal Yang Mendorong Ketika Remaja Melakukan Kerusuhan Pada Saat Acara Hiburan Di Selenggarakan**

No	Alternatif jawaban	Frekuensi	Presentase
1	Karena kemauan sendiri	26	26,00%
2	Karena di suruh orang lain	16	16,00%
3	Karena ikut-ikutan	12	12,00%
4	Karena di ajak teman	46	46,00%
	Jumlah	100 orang	100%

Dari tabel di atas, dapat di ketahui bahwa yang mendorong remaja untuk melakukan kerusuhan pada saat acara hiburan di laksanakan adalah karena di ajak teman sebanyak 46 orang (46,00%), sebanyak 26 orang (26,00%) yang menjawab karena kemauan sendiri, sebanyak 16 orang (16,00%), menjawab karena di suruh orang lain dan 12 orang (12,00%) menjawab karena ikut-ikutan sebanyak 12 orang (12,00%),

Hal di atas menunjukan bahwa kerusuhan yang terjadi saat acara hiburan di laksanakan di dorong oleh karena para remaja telah mengonsumsi alkohol

sehingga mereka melakukan tindak kriminal secara bersama-sama dan ini di sebabkan oleh faktor pergaulan sangat menentukan pembentukan tingkah laku masyarakat, sehingga para pemuda mudah terpengaruh oleh ajakan teman-teman, hal ini membuktikan bahwa kurang mampunya remaja tersebut mengontrol diri dalam memelihara keamanan dan keteriban saat acara hiburan sedang berlangsung.

**C. Pandangan Piqh Jinayah terhadap peranan dari pihak kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat.**

Salah satu dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan fiqh terhadap peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis untuk menyelesaikan masalah ini dapat di lihat dalam uraian sebagai berikut.

Memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi, sebab mengatasi suatu kemungkaran merupakan Fardu kifayah, sebagai tanggung jawab polisi maka pihak kepolisian harus berusaha mengatasi tindak kriminalitas yang akan terjadi ketika acara hiburan di selenggarakan. Istilah kepolisian atau pejabat kepolisian dalam piqh siyasah dinamakan shahib al-shurtah.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, polisi sektor Rupat menghimbau dan mengadakan musyawarah dengan pemerintah Desa, Orang tua

---

<sup>13</sup> J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* ,( Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999),h.65

dan Pemuka Masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengatasi tindak kejahatan yang dapat di timbulkan oleh terselenggaranya hiburan agar dapat hasil yang maksimal dalam islam juga di terangkan bahwa hendaklah bermusyawarah dalam menyelesaikan urusan dunia, hal ini sesuai dengan firman allah, dalam Surat Ali-Imran Ayat 159:



“dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya<sup>14</sup>.”

Dari musyawarah tersebut di temukan beberapa jalan untuk mengatasi supaya tidak terjadinya kejahatan dalam pelaksanaan acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat, adapun peran di antara upaya antisipasi yang di lakukan oleh kepolisian Sektor Rupert adalah:

1. Membentuk kegiatan remaja, yaitu: ikatan remaja masjid, pemuda dan pancasila dan karang taruna.

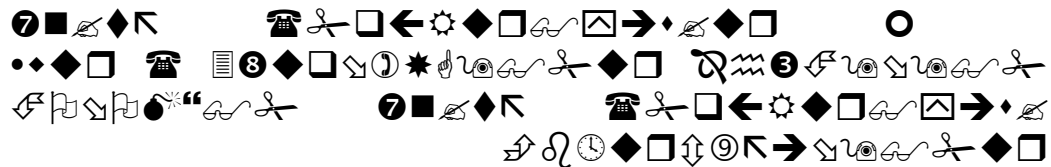
Di bentuknya kegiatan ini supaya para pemuda bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga tidak berkeinginan melakukan kejahatan tindak kriminal. Selain itu juga agar remaja mempunyai nilai kehidupan spesial yang tinggi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan itu akan menambah rasa tanggung jawab mereka terhadap kegiatan masyarakat, bangsa dan agama, rasa tanggung jawab itu

---

<sup>14</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 71



dapat berupa gotong royong, tolong menolong antar sesama dan lainnya, hal ini sesuai yang terdapat dalam firman Allah SWT. Dalam surat al-maidah ayat 2:

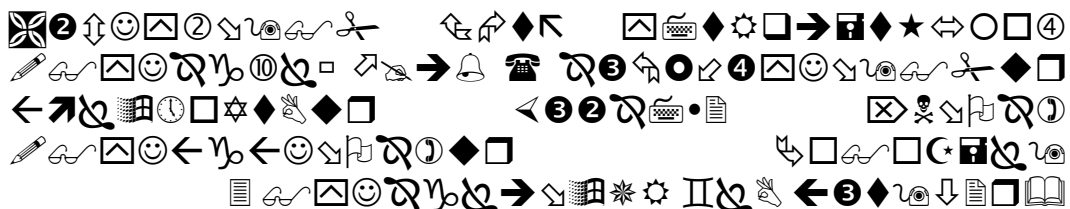


“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya<sup>15</sup>.”

2. Mengadakan seminar tentang bahaya mengkonsumsi narkoba atau obat yang terlarang dan minuman keras dan tindak kriminal lainnya

Dengan adanya seminar di harapkan remaja akan takut dan waspada dalam hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. meminum minuman yang memabukkan dan berjudi adalah dua hal perbuatan yang di larang, para peminum khamar dan pelaku judi di nilai sebagai prilaku setan. Dalil hukum yang mengatur tentang sanksi hukum peminum khamar di ungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an tentang status hukumnya<sup>16</sup> sebagai berikut:

- a. Surat al-baqarah ayat 219:



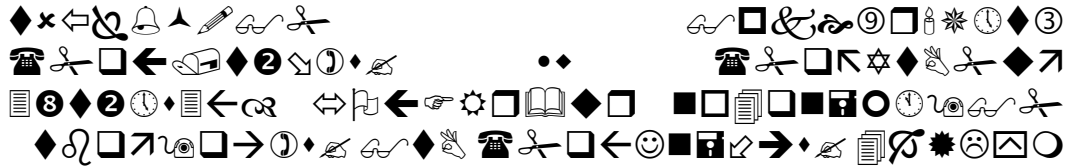
“mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya<sup>17</sup>.”

<sup>15</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106

<sup>16</sup> Ali zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet Ke-2, h. 93.

<sup>17</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.32

b. Surat an-nisa' ayat 43



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.<sup>18</sup>

Hadist Rasulullah SAW

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُخْرِجَهُ مُسْلِمٌ ,

“Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)<sup>19</sup>.”

Khomar adalah minuman yang mengandung alcohol, tidak peduli berapa kadar alcohol di dalamnya. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa stetes saja dalam minuman hukumnya sudah haram, islam mengharamkan khamar atau minuman keras itu karena dapat merusak akal, larangan ini tertuju pada setiap minuman keras yang potensial yang dapat memabukkan dan biasanya memang di gunakan untuk mabuk-mabukan.<sup>20</sup>

Maka dari keterangan di atas bahwasanya di dalam agama islam sangat melarang siapapun meminum khomar walaupun hanya sedikit, para ulama sepakat

<sup>18</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 85

<sup>19</sup> Moh Machfuiddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1985), h. 648

<sup>20</sup> Nasir Cholis, *fiqih Jinayah (hukum pidana islam)*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000), h.

bahwa para pemakai khomar di tetapkan sanksi hukum Had, yaitu didera sesuai dengan berat ringanya tindak pelanggaran yang di lakukan oleh seseorang, terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman yang memabukkan , menurut pendapat Imam Malik dan Hanafi akan di jatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, menurut syafi'i hukumanya hanya 40 kali. Sanksi tersebut di kenakan kepada para pemakai yang telah mencapai usia dewasa dan berakal sehat, bukan atas dasar keterpaksaan, dan megetahui kalau benda yang yang di konsumsi itu memabukkan.

3. Megambil keputusan bersama antara pihak Kepolisian, tokoh Masyarakat, Camat, Lurah/Kepala Desa setempat dan para Tokoh masyarakat

Keputusan yang di sepakati untuk acara hiburan malam tidak di benarkan lagi dan tidak di berikan izin dari pihak kepolisian karena adanya hal-hal yang bersifat negatif, diantaranya waktu pelaksanaan yang menampilkan suasana remang-remang di sekitar terjadinya acara hiburan dan bercampurnya antara wanita dan pria yang bukan muhrimnya serta sering kali terjadinya mabuk-mabukan dan perkelahian, di samping itu banyak biduanita yang berpakaian tidak menutup aurat. Salah satu bentuk tarian adalah tarian timur (tarian oriental) yang di lakukan oleh seorang penari wanita yang profesional, dalam tarian ini, sang penari bergerak meliuk-liuk, melata dan melingkar bak seekor ular, yang mengelora syahwat kaum laki-laki yang telah membayar mahal untuk menontonya, apalagi ia hanya berpakaian minim, atau bahkan nyaris telanjang. Karena biasanya, kalupun penari tersebut megenakan pakaian, tetapi pakaian

dengan Firman Allah SWT dalam surat An-Nur Ayat 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

<sup>21</sup> Yusuf Al-Qardawi, *fikih hiburan*, Edisi Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka Alkausar 2005) Ket Ke-1 h. 168

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung<sup>22</sup>.”

Dengan adanya hiburan musik yang di iringi dengan nyayian oleh biduanita yang berpakaian minim atau tidak menutup aurat akan dapat mendatangkan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at islam.

Adapun Pendapat ulama tentang nyayian dan musik hiburan

1. Nyayian itu haram imam Qurtubi berkata: “ itulah pendapat Mazhab Imam Malik”.
2. Yunus Bin Abdul A'al menyatakan: aku pernah bertanya kepada Imam Syafi'i tentang mendengar musik dan nyayian, maka beliau menjawab: “ sama sekali aku tidak mengetahui ulama hijaz mana yang melarang mendengarkan nyayian kecuali jelas-jelas mengharamkan.
3. Imam Ahmad sangat membenci atas lagu yang di iringi dengan sesuatu yang dapat menimbulkan perbuatan dosa. Imam Ahmad berpendapat bahwa musik itu makruh.
4. Abu Hanifah membolehkan nyayian dan sejenisnya untuk di dengarkan dan di iringi seni sesuai dengan lagu<sup>23</sup>.

Dari penjelasan di atas maka para ulama banyak yang tidak membolehkan hiburan yang berupa musik menganut mazhab maliki, sedangkan ulama yang membolehkan hiburan yang berupa musik tetapi juga di iringi oleh hal-hal yang dapat mendatangkan perbuatan dosa seperti adanya hal-hal yang bertentangan

---

<sup>22</sup> Departemen agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 353

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardawi, *Fiqh Musik dan Lagu*, (Bandung: Mukhtabarah Wahbah, 2002) Cet. 1.

dengan ajaran islam baik yang datangnya dari nyayian atau pun pelaksanaanya yang dapat mengundang terjadinya kemungkaran adalah bermazhab kepada Imam Abu Hanifah.

Imam ahmad sangat membenci tetapi beliau tidak melarang nyayian dan musik dan apabila di hindari akan mendapatkan pahala.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah di paparkan pada bab-bab terdahulu maka penulis meyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan kepolisian dalam memberikan pengamanan pada acara hiburan yang di laksanakan masyarakat adalah berjalan dengan baik, dengan cara memberikan pengamanan, pembinaan dan peyuluhan kepada masyarakat khususnya lagi kepada para pemuda atas kerja sama dengan perangkat desa, ketua Pemuda, Alim ulama dan tokoh masyarakat
2. Adapun respon masyarakat terhadap upaya yang di lakukan pihak kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya kerusuhan pada acara hiburan yang di selenggarakan oleh masyarakat ada yang meyetujui dan ada yang tidak meyetujui bagi yang meyetujui karna dengan adanya pihak kepolisian bisa mengantisipasi dan menangani kerusuhan sedangkan yang tidak meyetujui karna pihak kepolisian tidak berada di lokasi kejadian saat acara hiburan di selenggarakan sehingga setiap acara hiburan di laksanakan sering terjadi kerusuhan.
3. Berdasarkan pandangan fiqh jinayah pihak kepolisian telah melakukan beberapa bentuk pengamanan diantaranya pengamanan terbuka yaitu yang mana pihak kepolisian berpakaian seragam dinas kepolisian dan pengamanan tertutup yaitu pihak kepolisian tidak menggunakan pakaian

seragam dinas kepolisian serta upaya-upaya antisipasi telah dilakukan supaya tidak terjadi kerusuhan saat acara hiburan diselenggarakan, namun para pemuda itu sendiri sering melakukan kerusuhan disebabkan oleh para pemuda mengonsumsi alkohol dan hal ini sangat dilarang dalam Islam dan mempunyai sanksi yang tegas berupa had.

## **B. Saran**

1. Bagi pihak kepolisian agar lebih berperan aktif dalam menangani tindak kejahatan yang dilakukan oleh para pemuda khususnya dalam pelaksanaan acara-acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hendaknya lebih selektif untuk memberikan izin penyelenggaraan terhadap acara hiburan yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri.
2. Bagi penyelenggara supaya mempertimbangkan hal yang akan terjadi ketika ingin melaksanakan acara hiburan dan hendaknya acara yang dilaksanakan harus diketahui oleh pihak kepolisian supaya pihak kepolisian melakukan pengamanan.
3. Bagi pemuda hendaknya jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kerusuhan sehingga acara hiburan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar penyelenggaraan hiburan jangan dijadikan ajang permusuhan tetapi jadikan sebagai ajang untuk memperbanyak silaturahmi dan saling kenal-mengenal antara satu sama lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Muassasah Ar-Risalah), Cet Ke-1
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 1986) Cet.Ke.1
- Aladip, Machfuddin, Moh, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Toha Putra, 1985), cet ke-1
- Cholis, Moh, Nasir, *fiqih jinayah (Pidana Islam)*, (pekanbaru: susqa press, 2000)cet ke-1
- David Berry, *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi*, ( Jakarta: CV. Rajawali, 1999) cet ke-1
- Departemen Agama RI, *al-qur'an dan terjemhannya*, ( Jawa Barat, CV. Penerbit Ponegoro, 2006), Cet Ke-10
- Hulsman, ML, HC, *sistem peradilan pidana*, (Jakarta: Raja Wali,1948) Cet Ke-1
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT Grapindo Persada,2010) Cet Ke-9
- KRMT indro kampling susono, *Cara Pintar Jadi Event Organizer* (yogyakarta :Galang Press, 2006).
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) Cet Ke-29
- Pulungan, J.Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) Cet ke-4
- Redaksi Dan Yayasan Obor Indonesia, *Jurnal Polisi Indonesia*, (Jakarta: Buku Obor, 2000)
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000) Cet Ke-1
- Redaksi, *Undang-Undang dan Peraturan Tentang Kepolisian RI*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Sadjijono, *mengenal Hukum Kepolisian*, (yogyakarta :Laksbang, Medaitama, 2008).cet ke-2

Setya Yuwana Sudikan, Ragam Metode Pengumpulan Data, *dalam burhan bugin (ed), metode penelitian kualitatif*, ( jakarta: PT. Raja grapindo persada, 2001)cet ke-1

Soejono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers) cet ke-1

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2003) Cet Ke-1

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Repuplik Indonesia*, (Bandung: Citra Umbara, 2009) cet ke-1

Wirjono Prodjikoro, *Tindak-Tindak Kejahatan Tertentu Di Indonesia* (Bandung, PT. Grafika Aditama, 2003).

Yuli Hastin, Emma, *Bekerja sebagai polisi*, (Jakarta: Esensi Erlangga Group, 2008), Cet Ke-12

Yusuf Al-Qardawi, *Fiqih Musik dan Lagu*, ( Bandung: Mukhtabarah Wahbah, 2002) cet. 1.

-----, *Fikih hiburan*, Edisi Indonesia (Jakarta Timur: Pustaka Alkausar 2005) Ket Ke-1

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Cet Ke-2

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, ( Jakarta: Haji Masagung, 1994), cet ke-1